

BAB 5

KESIMPULAN

Kesimpulan yang diperoleh setelah melakukan kegiatan PKPA adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek sekaligus memastikan semua aspek untuk berjalan dengan baik.
2. Meningkatkan wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mampu memahami dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek
4. Meningkatkan kesiapan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional
5. mengetahui gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek saat mempraktekkan peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam memberikan pelayanan kefarmasian di apotek meliputi pengadaan, penerimaan, penataan, peracikan, penyerahan perbekalan farmasi serta mampu memberikan komunikasi, informasi dan edukasi terhadap pasien.

SARAN

1. Calon apoteker perlu untuk terus mengembangkan dan meningkatkan kompetensi ilmu kefarmasian agar lebih siap untuk praktek kerja dan bekerja sama dengan tenaga kesehatan lintas profesi yang lain.
2. Calon apoteker penting untuk menjunjung kode etik pelayanan kefarmasian dengan prinsip *patient oriented*.
3. Apabila terdapat kasus terkait kesehatan khususnya mengenai obat-obatan diharapkan apoteker juga ikut andil dalam memberikan saran sesuai bidang keilmuannya.
4. Calon apoteker juga perlu untuk senantiasa menjaga bentuk tubuh agar senantiasa proporsional (tidak terlalu gemuk/tidak terlalu kurus) karena diperlukan jika akan melakukan promosi kesehatan kepada masyarakat.
5. Calon apoteker agar lebih mempelajari juga terkait terapi non-farmakologi untuk tiap-tiap keluhan/gejala/penyakit

DAFTAR PUSTAKA

- BNF, 2021, British National Formulary 81th Edition, *BMJ Group*, London, UK.
- Gleiter, C. H., and Mörrike, K. E. 2002, Clinical pharmacokinetics of candesartan. *Clinical pharmacokinetics*, **41(1)**: 7–17.
- Kantar, A., Klimek, L., Cazan, D., Sperl, A., Sent, U., and Mesquita, M. 2020, An overview of efficacy and safety of ambroxol for the treatment of acute and chronic respiratory diseases with a special regard to children, *Multidisciplinary respiratory medicine*, **15(1)**: 511.
- Katzung, B.G. and Trevor, A.J. 2018, *Basic and Clinical Pharmacology 14th edition*, McGraw-Hill, USA.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 347/MENKES/SK/VII/1990 tentang Daftar Obat Wajib Apotek No. 1, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 924/MENKES/PER/ X/1993 tentang Daftar Obat Wajib Apotek No. 2, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/SK/X/1999 tentang Daftar Obat Wajib Apotek No. 3, Jakarta.
- Lykkesfeldt, J. and Tveden-Nyborg, P. 2019, The Pharmacokinetics of Vitamin C, *Nutrients*, **11(10)**: 2412.
- McEvoy, Gerald K., et al. 2011, *AHFS Drug Information, America Society of Health-System Pharmacist*, Bethesda, Maryland.
- Moffat, A.C., Osselton, M.D, dan Widdop, B. 2011, Clarke's Analysis of Drugs and Poisons 4th edition, *Pharmaceutical Press*, USA.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 1990, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 246/ MENKES/PER/ V/ 1990 tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta

- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 1993, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 919/ MENKES/PER/ X/ 1993 tentang Kriteria Obat yang Dapat Diserahkan Tanpa Resep, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2015, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun Tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2018, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2018, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tentang Pekerjaan Kefarmasian, Jakarta: Republik Indonesia.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2021, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2009, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Jakarta.

- Pemerintah Republik Indonesia. 2010, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2010, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1191/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2015, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2020, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2020, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2021, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2020, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2021 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2021, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, Jakarta.

- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2021, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan, Penggolongan, Pembatasan dan Kategori Obat, Jakarta.
- Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia. 2014, Peraturan Organisasi tentang Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 4, 2018, tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penarikan dan Pemusnahan Obat yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat, Mutu, dan Label, 2019.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian.
- Undang Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.